

ANALISIS AKTIVITAS *MEDIA RELATIONS* SUB BAGIAN HUMAS, PROTOKOL DAN PERJALANAN DPRD PROVINSI NTB DALAM MENJAGA CITRA POSITIF ORGANISASI

Muhammad Fadhil¹, Eka Putri Paramita², Shinta Desiyana Fajarica³

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia, NTB

ABSTRAK

Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan merupakan salah satu sub bagian yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Dewan DPRD Provinsi NTB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas *media relations* Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB dalam menjaga citra positif organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Sub Bagian Humas Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB. Penulis menetapkan empat informan utama dan satu informan pendukung melalui teknik *purposive sampling*. Sementara itu, objek penelitian ini ialah aktivitas *media relations* Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB dalam menjaga citra positif organisasi. Penulis menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi dalam mengumpulkan data penelitian. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penulis menggunakan triangulasi data dalam menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB telah melakukan beberapa aktivitas *media relations*, seperti konferensi pers dan *press release*. Selain itu, Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB juga menggunakan *website*, *instagram*, *youtube* dan *facebook* sebagai media publikasi untuk menjangkau khalayak dengan lebih luas. Namun, aktivitas *media relations* yang dilakukan Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB belum maksimal karena hanya melakukan konferensi pers dan *press release* saja. Adapun hambatan yang dihadapi Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB dalam menjalankan *media relations*, di antaranya hambatan berupa kurangnya anggaran untuk kegiatan, perbedaan persepsi dan koordinasi internal. Adapun pendukung dalam menjalankan *media relations* yaitu dengan adanya *press room* yang dapat menjadi ruang pertemuan hingga ruang santai bagi wartawan.

Kata Kunci : *Media Relations*, Citra Positif DPRD Provinsi NTB

ABSTRACT

Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan is one of the subsections under the coordination of the Secretary of the NTB Provincial DPRD Council. This research aims to determine the media relations activities of the Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB in maintaining a positive image of the organization. This research uses a qualitative descriptive research method. The subject of this research is the Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan

DPRD Provinsi NTB. The author determined four main informants and one supporting informant through purposive sampling technique. Meanwhile, the object of this research is the media relations activities of the Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB in maintaining a positive image of the organization. The author used in-depth interview methods, observation and documentation studies in collecting research data. The data analysis technique that the author uses is the Miles and Huberman model which consists of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The author uses data triangulation to test the validity of the data. The research results show that the Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB has carried out several media relations activities, such as press conferences and press releases. Apart from that, the Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB also uses websites, Instagram, YouTube and Facebook as publication media to reach a wider audience. However, the media relations activities carried out by the Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB were not optimal because they only held press conferences and press releases. The obstacles faced by the Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB in carrying out media relations include obstacles in the form of a lack of budget for activities, differences in perception and internal coordination. The support in carrying out media relations is the existence of a press room which can be a meeting room or a relaxing room for journalists.

Keywords: *Media Relations, Positive Image of the DPRD Provinsi NTB*

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga yang harus memiliki citra positif adalah lembaga negara, karena lembaga ini merupakan lembaga tinggi negara yang harus dipercaya publik. Salah satunya adalah lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang pada tiap provinsi memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama yaitu; Pertama, sebagai fungsi legislasi yaitu lembaga yang berfungsi dalam mengusulkan, membuat, dan mengesahkan undang – undang. Kedua sebagai fungsi anggaran, menyusun serta mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, sebagai fungsi pengawasan terhadap pemerintah yang menjalankan undang – undang.

Dari beberapa peran dan fungsi tersebut menjadikan DPRD sebagai organisasi yang wajib memiliki citra positif guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang diwakilinya. Keberadaan DPRD dalam pemerintahan sebagai lembaga politik dituntut memiliki reputasi positif dalam lembaga tersebut. Citra positif ini ditujukan agar publik atau masyarakat dapat mempercayai kinerja para wakil rakyatnya dan menciptakan kepercayaan kepada lembaga DPRD.

Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB merupakan salah satu sub bagian pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Dewan. Banyaknya kegiatan yang dilakukan DPRD Provinsi NTB sebagai lembaga tinggi tentunya dibutuhkan penyampaian informasi yang jelas dari DPRD kepada masyarakat dan media. Oleh karena bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka peran serta Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan sangat penting guna menjembatani setiap bentuk informasi dan komunikasi yang berkembang, baik oleh DPRD Provinsi NTB kepada masyarakat atau sebaliknya dan antar masyarakat itu sendiri. Banyak dari kegiatan humas selalu berkaitan dan berhubungan dengan media. Terlebih DPRD Provinsi NTB sebagai salah satu lembaga pemerintah tertinggi di NTB. Berdasarkan hal tersebut Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB telah menjalin kerja sama dengan media, baik itu media cetak, *online*, elektronik dan radio. Humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis, divisi humas dalam institusi pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka, memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, serta hasil-hasil kerja institusi dan

memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat (Kusumastuti, 2004: 37).

Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB merupakan salah satu sub bagian pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Dewan. Banyaknya kegiatan yang dilakukan DPRD Provinsi NTB sebagai lembaga tinggi tentunya dibutuhkan penyampaian informasi yang jelas dari DPRD kepada masyarakat dan media. Oleh karena bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka peran serta Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan sangat penting guna menjembatani setiap bentuk informasi dan komunikasi yang berkembang, baik oleh DPRD Provinsi NTB kepada masyarakat atau sebaliknya dan antar masyarakat itu sendiri. Banyak dari kegiatan humas selalu berkaitan dan berhubungan dengan media. Terlebih DPRD Provinsi NTB sebagai salah satu lembaga pemerintah tertinggi di NTB. Berdasarkan hal tersebut Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB telah menjalin kerja sama dengan media, baik itu media cetak, *online*, elektronik dan radio. Humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis, divisi humas dalam institusi pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka, memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, serta hasil-hasil kerja institusi dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat (Kusumastuti, 2004: 37).

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melihat secara mendalam terkait dengan aktivitas *media relations* yang dilakukan oleh Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan dalam upaya menjaga citra positif DPRD Provinsi NTB. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Aktivitas *Media Relations* Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB dalam Menjaga Citra Positif Organisasi”.

KAJIAN PUSTAKA

1. *Media Relations*

Iriantara (2005) menguraikan definisi mengenai media relations sebagai berikut:

- a. *Media relations* itu berkenaan dengan media komunikasi. Media komunikasi disini diperlukan karena menjadi sarana yang sangat penting dan efisien dalam berkomunikasi dengan publik. Agar komunikasi dengan publik bisa terpelihara, maka kepentingan media massa terhadap organisasi mesti direspon organisasi. Tujuannya adalah untuk keberhasilan program.
- b. *Media relations* itu pada dasarnya berkenaan dengan pemberian informasi atau memberi tanggapan pada media pemberitaan atas nama organisasi atau klien. Karena berhubungan dengan media massa itulah, maka ada yang menyebut bahwa *media relations* itu merupakan fungsi khusus di dalam suatu kegiatan atau program *public relations*.

Pendapat Iriantara menjelaskan bahwa secara teknis kegiatan *media relations* berkenaan dengan media komunikasi sebagai sarana pemberi informasi dari organisasi. Ataupun sebagai penerima tanggapan dari publik terhadap organisasi. Dengan begitu komunikasi dua arah antara organisasi dan publiknya akan tercipta.

2. Konsep Citra

1. Pengertian citra

Menurut Dr. Elvinari Ardianto (2011:62) citra adalah perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, organisasi atau lembaga; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Citra dengan sengaja diciptakan agar bernilai positif.

2. Citra organisasi

Menurut Wasesa (2005) citra perusahaan di mata publik dapat dilihat dari pendapat atau pola pikir khalayak pada saat mempersepsikan realitas yang terjadi. Realitas bisa didapatkan dari media massa atau media-media lain yang berhubungan langsung dengan publik, bisa dianggap mewakili persepsi yang lebih besar atau massif, yakni seluruh masyarakat.

3. Teori/model citra

Ruslan (2007:77) menyebutkan ada beberapa jenis citra (*image*) menurut Jefkins. Berikut ini enam jenis citra yang dikemukakan, yakni:

1) Citra cermin (*mirror image*)

Citra yang diyakini oleh perusahaan, terutama para pemimpinannya yang selalu merasa dalam posisi baik tanpa mengacuhkan kesan orang luar.

2) Citra kini (*current image*)

Adalah kesan yang baik diperoleh dari orang lain tentang perusahaan/organisasi atau hal yang lain yang berkaitan dengan produknya.

3) Citra yang diharapkan (*wish image*)

Adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen terhadap perusahaan/organisasi.

4. Pencapaian Citra Positif

Menurut Rosady Ruslan (2007), Kesan terhadap suatu objek tidak hanya selalu berbicara mengenai hal positif, akan tetapi juga mengenai yang negatif. Kedua macam citra bersumber dari adanya citra-citra yang berlaku (*current image*) yang bersifat negatif dan positif. Dan seharusnya citra humas di dasari pada kesan yang benar, yakni sepenuhnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman atas kenyataan yang sesungguhnya.

3. Aktivitas Humas

Menurut Ruslan (2005) garis besar aktivitas utama humas berperan sebagai berikut:

1) *Communicator*

Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (*Spoke Person*) atau tatap muka dan sebagainya. Disamping itu juga bertindak sebagai mediator ;

2) *Relationship*

Kemampuan humas untuk membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Juga berupaya menciptakan hubungan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerja sama dan toleransi antara kedua belah pihak tersebut;

3) *Back up Management*

Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia dan sebagainya untuk mencapai tujuan pokok perusahaan;

4) *Good Image Maker*

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas humas dan melaksanakan manajemen kehumasan yaitu membangun citra atau nama baik lembaga/organisasi dan produk yang diwakilinya.

4. Media humas

Menurut Jefkin dalam (Nova, 2009: 209) pengertian dari hubungan media adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi Humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi yang bersangkutan. Media Humas sendiri merupakan saluran media komunikasi yang dipilih oleh Humas untuk sarana penyampaian informasi baik untuk publik internal maupun publik eksternal. Liputan yang baik di media akan memberikan pencitraan yang baik pula bagi perusahaan, meningkatkan kepercayaan khalayak dalam menerima produk humas. Aktivitas Humas inilah yang menjalin relasi dengan media dan mendapatkan kepercayaan dari lipuan media.

5. Humas Pemerintahan

Humas pemerintah atau *government public relations* merupakan penggabungan dua kata yaitu hubungan masyarakat (humas) dan pemerintah. Namun batasannya bukan berarti penggabungan dua pengertian tersebut. Pengertian sederhana tentunya tidak salah, akan tetapi teorinya tidak selalu demikian, terutama tentang titik tekan kajian ilmunya (Suprawoto, 2017:44).

Kata *government* atau pemerintah memiliki pengertian yang sangat luas. Kata tersebut dapat mencakup orang atau badan yang secara politik diberikan kewenangan memerintah suatu entitas tertentu, atau sebuah kiat dalam menjalankan proses memerintah, atau pun sebuah sistem kebijakan memerintah. Tetapi kata tersebut dapat juga menunjuk pada administrasi atau manajemen dari suatu organisasi yang menjalankan fungsi memerintah suatu entitas politik tertentu. Pilihan makna dari kata pemerintah akan sangat tergantung pada konteksnya.

6. Citra Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB

Berdasarkan maklumat pelayanan informasi publik Sekretaris DPRD Provinsi NTB. Fungsi dan tujuan Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan adalah untuk memberikan pelayanan informasi yang dapat secara mudah didapatkan oleh publik, menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik, menyiapkan sistem informasi dan dokumentasi yang baik dan dapat diakses dengan mudah, serta menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi tinggi dan siap melayani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti mengidentifikasi, menggali dan mengkaji permasalahan yang diteliti secara lebih mendalam, sehingga sangat memperhatikan proses serta detail data yang diteliti.

Sumber data primer dari penelitian ini merupakan informan yang ditentukan berdasarkan kriteria bahwa orang-orang tersebut merupakan informan yang pernah melakukan maupun terlibat dalam proses *media relations* yang dilakukan oleh Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini ialah menggunakan *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama adalah narasumber yang biasanya berasal dari tokoh dalam sebuah perusahaan atau lembaga organisasi yang memiliki jabatan penting yang dapat memberikan informasi yang menjadi sumber data dari peneliti.

Jadi, informan utama dalam penelitian ini adalah Sub Koordinator dan Staf Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB, karena sebagai pimpinan yang bertanggung jawab pada tiap kegiatan dan pengolahan media komunikasi pada Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB. Sedangkan informan pendukung pada penelitian ini adalah wartawan Pos Bali yang juga sebagai Ketua Forum Wartawan Parlemen. Informan pada penelitian ini ditentukan karena sesuai dengan tujuan penelitian dan mudah ditemui ataupun didekati peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Citra DPRD Provinsi NTB

Berdasarkan hasil penelitian, sejauh ini citra DPRD Provinsi NTB cukup baik. Salah satu penyebabnya adalah karena penampakan citra – citra baik DPRD Provinsi NTB selalu diperlihatkan melalui media, baik itu media publikasi milik DPRD Provinsi NTB maupun pada media yang telah bekerja sama dengan DPRD Provinsi NTB.

Upaya dalam menjaga citra organisasi tentunya tidak bisa dilakukan secara serampangan terlebih pada lembaga tinggi negara yang selalu menjadi sorotan media dan masyarakat. Organisasi yang memiliki citra yang positif pada umumnya berhasil membangun citra positifnya setelah belajar banyak dari pengalaman. Mereka berupaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa lampau. Begitu pula dengan DPRD Provinsi NTB, terus berupaya menjaga citra baiknya melalui pemberitaan positif dengan melakukan aktivitas *media relations* untuk menjaga pemberitaan baik tentang organisasi.

2. Aktivitas *Media Relations*

DPRD Provinsi NTB melalui Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan yang melayani pelayanan informasi publik dengan memanfaatkan media sebagai alat untuk publikasi dan pencitraan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 2 aktivitas *media relations* Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB :

a) Konferensi Pers (*Press Conference*)

Melalui hasil penelitian, Kegiatan *press conference* jarang dilakukan. Diadakannya *press conference* yaitu saat adanya pemberitaan negatif tentang DPRD yang menjadi isu besar. Maka dibutuhkan adanya *press conference* untuk meluruskan berita tersebut dan sekaligus klarifikasi terhadap permasalahan yang terjadi. Pelaksanaan *press conference* hanya mengundang media – media yang melakukan kerja sama dengan DPRD Provinsi NTB. Pimpinan DPRD Provinsi NTB yang secara langsung menyampaikan *press conference* kepada media. Efek dari diadakannya *press conference* tersebut positif karena DPRD Provinsi NTB dapat meluruskan permasalahan yang terjadi agar tidak ada berita yang simpang siur di tengah masyarakat.

b) *Press Release*

Berdasarkan hasil penelitian, *press release* yang dibuat cenderung di publikasikan melalui *own media*. Sedangkan, untuk wartawan kerja sama humas memberikan dokumentasi kegiatan

berupa foto dan tema kegiatan. Selanjutnya wartawan membuat sendiri narasi beritanya. Peran *press release* dalam publikasi yang dilakukan Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan cukup penting karena penyampaian kegiatan rutin yang dilakukan DPRD Provinsi NTB baik itu dalam publikasi *own media* ataupun kepada media eksternal akan menjaga kepercayaan publik, bahwa lembaga tersebut telah melakukan tugasnya.

3. Hambatan dan Pendukung dalam Aktivitas *Media Relations*

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan mendapatkan hambatan yang cukup krusial yaitu kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan *media relations*. Sedangkan hambatan lain yang dialami tidak berat dan masih dapat diatasi oleh Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan dengan baik. Sedangkan, faktor pendukung dalam aktivitas *media relations* ini juga tidak banyak.

4. Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan dalam Menjaga Citra Positif Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan telah membangun hubungan baik dengan media melalui kegiatan – kegiatan *media relations* melalui kerja sama berbayar antara pihak media dan Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan dalam upayanya untuk menjaga citra positif DPRD Provinsi NTB. Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan juga menjalin kerja sama dengan media dalam hal ini wartawan untuk mendapatkan pemberitaan positif dengan timbal balik yang saling menguntungkan. Bahwa dengan melakukan kerja sama tersebut akan dapat menjaga kondusifitas pemberitaan media terhadap DPRD Provinsi NTB.

KESIMPULAN

Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan dalam upayanya menjaga citra DPRD Provinsi NTB telah melakukan aktivitas kehumasan dalam hal ini aktivitas *media relations*. Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD Provinsi NTB dalam aktivitas *media relations* melakukan *press release* dan *press conference*. Dengan memanfaatkan hubungan baik dan juga kerja sama berbayar dengan media, Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan mengoptimalkan kegiatan *media relations* yang dilakukannya.

Hambatan – hambatan yang dialami dalam melakukan aktivitas *media relations* cukup krusial yaitu kurangnya anggaran, sedangkan hambatan lain berupa kordinasi dan perbedaan persepsi dalam menjalankan aktivitas *media relations*. Namun, aktivitas *media relations* yang dilakukan

Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan cenderung sedikit dibandingkan humas lain di Lembaga pemerintah NTB. Tetapi melalui pemanfaatan kerja sama berbayar dengan media dalam melakukan aktivitas *media relations*, Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan dapat menjaga citra positif dari DPRD Provinsi NTB. Karena, kerja sama yang dibangun antara Sub Koordinator Humas, Protokol dan Perjalanan dengan media tersebut dapat dikatakan berhasil dengan timbal balik positif yaitu pemberitaan positif dari media.

DAFTAR PUSTAKA

Iriantara. (2005). *Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Kusumastuti, Frida. 2004. *Dasar-dasar Hubungan Masyarakat*. Ghalia Indonesia: Bogor.

Ardianto, elvinaro. (2011). *Handbook of Public Relations*. Bandung: Simbiosis Rekatama media.

Wasesa, Silih Agung. 2005. *Strategi Public relation*. Jakarta: Gramedia

Ruslan, Rosady. (2007). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nova, Fisan. (2009). *Crisis Public Relations*. Jakarta: Grasindo.

Suprawoto. (2017). *Government Public Relations Perkembangan & Praktik di Indonesia*. Jakarta. Prenamedia Group.